

Judul : Tanpa literasi, media digital bak pisau bermata dua
Tanggal : Sabtu, 22 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Tanpa Literasi Media Digital Bak Pisau Bermata Dua

ANGGOTA Komisi XIII DPR Meity Rahmatia mengingatkan pentingnya peran keluarga dalam literasi penggunaan *platform* media sosial. Hal tersebut berguna untuk mencegah terulangnya peristiwa peledakan di SMAN 72, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Meity menilai, orang tua dan keluarga harus menjadi pihak yang terdepan dalam pengawasan aktivitas anak dalam penggunaan platform digital. Selanjutnya, disusul dari lingkungan terdekat serta institusi sekolah yang turut melibatkan para pelajar secara aktif.

"Kami mengajak masyarakat agar meningkatkan peran keluarga dalam literasi penggunaan platform media digital," ujar Meity dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia juga mendukung upaya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan inovasi program pencegahan terorisme melalui platform digital. Inovasi tersebut bisa mencegah pengaruh kekerasan dan terorisme di platform media digital.

Politikus PKS itu memandang, media digital seperti pisau bermata dua. Memiliki dampak kebaikan dan positif bila berada di tangan orang baik. "Namun bisa pula negatif bila dikelola orang yang tidak baik, atau individu yang belum memiliki literasi digital. Karena itu, penggunaannya

harus bijak," ingatnya.

Persoalannya, sambung Meity, anak-anak sekarang nyaris tidak memiliki batasan apa pun dalam mengakses berbagai jenis konten di platform. Termasuk konten yang mengandung unsur kekerasan, dan kasus SMAN 72 menjadi contoh nyata yang menunjukkan kondisi tersebut.

"Belakangan juga terbongkar, ada upaya mempengaruhi anak-anak menjadi bagian dari terorisme melalui media digital," ujar Legislator asal Sulawesi Selatan itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Junico Siahaan mendesak Pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan seluruh platform digital usai peristiwa ledakan di SMAN 72. Itu menunjukkan negara tidak bisa lagi bersikap longgar dalam mengatur aktivitas digital, terutama yang melibatkan anak dan remaja sebagai kelompok pengguna terbesar.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Junico.

Dia menilai, peristiwa SMAN 72 menjadi alarm keras tentang urgensi pengawasan ruang digital secara sistemik. 'Pakaian digital' yang digunakan anak-anak, sambungnya, kini jauh lebih kompleks, sehingga Pemerintah tidak cukup hanya merespons secara reaktif. ■ PYB